

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

##### **1. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Indonesia**

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses perluasan pilihan penduduk, yaitu dalam hal usia harapan hidup yang panjang dan sehat, pendidikan yang baik, dan standar hidup yang layak. Pilihan lain termasuk kebebasan dalam hal politik, jaminan hak-hak asasi manusia, dan harga diri-apa yang Adam Smith sebut sebagai kemampuan untuk bergaul dengan orang lain tanpa "malu untuk tampil di depan umum". (*United Nation Development Programme, UNDP Report, 1990: 10*).

Pada prinsipnya tujuan dasar pembangunan yaitu untuk memperbanyak pilihan kepada masyarakat di mana pilihan-pilihan tersebut tidak terbatas dan dapat berubah kapan saja, sehingga masyarakat bisa memperoleh akses yang lebih besar terhadap pengetahuan dan pendidikan, nutrisi dan pelayanan kesehatan yang lebih baik, mata pencaharian yang aman, dan sebagainya. Bisa dikatakan bahwa tujuan akhir pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang dapat memungkinkan orang-orang menikmati hidup yang panjang, sehat, dan kreatif (*Mahbub Ul Haq, Founder of The Human Development Report*).

Alasan mengapa pembangunan manusia perlu mendapat perhatian adalah: *Pertama*, banyak negara berkembang termasuk Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi gagal mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan. *Kedua*, banyak negara maju yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi ternyata tidak berhasil mengurangi masalah-masalah sosial, seperti: penyalahgunaan obat, AIDS, alkohol, gelandangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. *Ketiga*, beberapa negara berpendapatan rendah mampu mencapai

Kuswara, 2014

*Pengembangan Model Pembelajaran Keberaksaraan Berorientasi Budaya Lokal Untuk Menuntaskan Tunaakasa Dewasa Pada Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Cirebon*  
Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

tingkat pembangunan manusia yang tinggi karena mampu menggunakan secara bijaksana semua sumber daya untuk mengembangkan kemampuan dasar manusia.

Tujuan pembangunan manusia seperti diuraikan di atas secara tegas memilih tiga sasaran yang ingin dicapai, yaitu hidup sehat dan panjang umur, berpendidikan, dan dapat menikmati hidup secara layak. Ini berarti pembangunan manusia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan kualitas manusia dan masyarakat. Karena itu, manusia merupakan sentral dari proses pembangunan. Sebagai sentral, manusia menjadi subjek, sekaligus objek pembangunan, dengan kata lain manusia sebagai pelaku dan sasaran pembangunan.

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolok ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), tingkat keberaksaraan (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan, dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup (UNDP, 1990).

Dalam buku *Pembangunan Manusia Berbasis Gender* (2013: 13-15) disebutkan bahwa secara umum perbandingan IPM antarnegara ASEAN menunjukkan disparitas yang cukup tinggi sejak tahun 1990. Namun, peningkatan IPM tidak secara langsung menggambarkan peringkat kualitas pembangunan manusia. Sebagai contoh, meskipun selama dua dekade IPM Myanmar telah meningkat secara signifikan, Myanmar tetap menjadi negara dengan IPM terkecil di kawasan ASEAN.

**Kuswara, 2014**

*Pengembangan Model Pembelajaran Keberaksaraan Berorientasi Budaya Lokal Untuk Menuntaskan Tunaakarsa Dewasa Pada Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Cirebon*  
Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

Menurut UNDP, Singapura dan Brunei Darussalam merupakan negara dengan capaian IPM sangat tinggi, sedangkan Malaysia menjadi negara dengan nilai IPM yang tinggi selama tahun 1990-2012. Nilai IPM ketiga negara tersebut masing-masing adalah 0,895; 0,855; dan 0,769 untuk tahun 2012, sedangkan nilai IPM terendah diperoleh Myanmar di antara negara lain di wilayah ASEAN yaitu 0,498 pada tahun 2012. Peringkat terendah berikutnya adalah Laos dan Kamboja dengan nilai IPM di tahun 2012 berturut-turut adalah 0,543 dan 0,543. Untuk negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi ke-6, dengan nilai capaian sebesar 0,629. Posisi yang sama seperti pada dua dekade sebelumnya.

Untuk melihat keterbandingan capaian pembangunan manusia antarnegara, dapat dilakukan dengan melihat keterbandingan capaian antarindeks komponen IPM. Indikator dimensi kesehatan atau indeks dimensi kesehatan Indonesia berada pada urutan ke enam dengan nilai capaian sebesar 0,782. Negara-negara yang dimensi kesehatannya berada di bawah Indonesia adalah Filipina, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nilai tertinggi untuk dimensi kesehatan dicapai oleh negara Singapura dengan nilai sebesar 0,963, sementara nilai terendah dicapai oleh negara Myanmar sebesar 0,718.

Komponen kedua adalah dimensi pendidikan yang diukur berdasarkan harapan lamanya sekolah (*expected years of schooling*) dan rata-rata lamanya sekolah (*mean years of schooling*). Kedua indeks tersebut digabung menjadi indeks pendidikan. Negara yang mempunyai nilai dimensi pendidikan tinggi adalah Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Indonesia berada pada posisi ke enam dengan nilai 0,575. Negara-negara yang dimensi pendidikan di bawah Indonesia adalah Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar.

Komponen ketiga yang nilainya terbesar untuk negara-negara dengan IPM tinggi di ASEAN adalah pendapatan. Komponen pendapatan ini diukur dari *Product National Brutto* (PNB) per kapita riil yang disesuaikan *Purchasing Power Parity* (PPP). Negara Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan

**Kuswara, 2014**

*Pengembangan Model Pembelajaran Keberaksaraan Berorientasi Budaya Lokal Untuk Menuntaskan Tunaakarsa Dewasa Pada Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Cirebon*  
Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

Thailand mempunyai nilai per kapita riil di atas Indonesia, sementara negara-negara Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar mempunyai pendapatan perkapita riil di bawah Indonesia. Dari ketiga dimensi, Indonesia menduduki peringkat yang sama kecuali pada dimensi pendapatan. Sementara Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia selalu menduduki peringkat tiga besar di antara negara ASEAN pada ketiga dimensi tersebut. Nilai tiga dimensi yang tinggi membentuk nilai yang juga tinggi pada IPM negaranya.

Dari segi pembangunan sosial kemasyarakatan, angka IPM di negara-negara Asia Tenggara dan Timur bervariasi dari *very high*, *high*, *medium*, sampai *low human development*. Gambaran sederhana tentang keragaman jumlah penduduk, luas wilayah, raihan pembangunan manusia dan kemajuan ekonomi dapat dirujuk pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Peringkat IPM di Beberapa Negara Asia**

Negara	Tahun				
	1995	2000	2005	2010	2013
Thailand	58	76	73	92	103
Malaysia	59	61	61	57	64
Filipina	100	77	84	97	114
Indonesia	104	109	110	108	121
Tiongkok	111	99	85	89	101
Vietnam	120	108	108	113	127
Jumlah	n.a.	n.a.	127	129	129

*Sumber: UNDP (1995, 2000, 2005, 2010, 2013)*

Perkembangan IPM Indonesia juga relatif berfluktuasi dan selalu berada di bawah Tiongkok, Thailand, Malaysia dan Filipina. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan Indonesia masih di bawah negara-negara tetangga kecuali Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Bahkan

Kuswara, 2014

*Pengembangan Model Pembelajaran Keberaksaraan Berorientasi Budaya Lokal Untuk Menuntaskan Tunaakasa Dewasa Pada Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Cirebon*  
Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

Tiongkok dengan jumlah penduduk lebih dari empat kali lipat penduduk Indonesia masih lebih tinggi peringkat dan indeks pembangunannya.

Dalam lingkup nasional, data survei Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai IPM tahun 2012 menempatkan Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi dengan peringkat IPM tertinggi di Indonesia, yaitu 78,33. Peringkat tertinggi selanjutnya ditempati oleh Provinsi Sulawesi Utara (IPM=76,95), Riau (76,9), DI Yogyakarta (76,75), dan Kalimantan Timur (76,71). Sementara itu, peringkat lima terbawah diduduki oleh Provinsi Papua (IPM=65,86), Nusa Tenggara Barat (66,89), Nusa Tenggara Timur (68,28), Maluku Utara (69,98), dan Papua Barat (70,22).

Secara nasional, rata-rata IPM Indonesia adalah sebesar 73,29, dengan Provinsi Jawa Tengah (73,36), Bali (73,49), dan Jawa Barat (73,36) yang berada di sekitar rata-rata IPM nasional. Daftar peringkat IPM per provinsi selengkapnya berdasarkan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang bersumber dari data BPS.

**Tabel 1.2**  
**Indeks Pembangunan Manusia Indonesia**  
**Tahun 2010–2012**

Provinsi	IPM		
	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Nanggroe Aceh D	71,7	72,16	72,51
2. Sumatera Utara	74,19	74,65	75,13
3. Sumatera Barat	73,78	74,28	74,7
4. Riau	76,07	76,53	76,9
5. Jambi	72,74	73,3	73,78
6. Sumatera Selatan	72,95	73,42	73,99
7. Bengkulu	72,92	73,4	73,93
8. Lampung	71,42	71,94	72,45
9. Bangka Belitung	72,86	73,37	73,78
10. Kepulauan Riau	75,07	75,78	76,2

Kuswara, 2014

*Pengembangan Model Pembelajaran Keberaksaraan Berorientasi Budaya Lokal Untuk Menuntaskan Tunaakasa Dewasa Pada Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Cirebon*  
Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

11. DKI Jakarta	77,6	77,97	78,33
12. Jawa Barat	72,29	72,73	73,11
13. Jawa Tengah	72,49	72,94	73,36
14. Yogyakarta	75,77	76,32	76,75
15. Jawa Timur	71,62	72,18	72,83
16. Banten	70,48	70,95	71,49
17. Bali	72,28	72,84	73,49
18. Nusa Tenggara Barat	65,2	66,23	66,89
19. Nusa Tenggara Timur	67,26	67,75	68,28
20. Kalimantan Barat	69,15	69,66	70,31
21. Kalimantan Tengah	74,64	75,06	75,46
22. Kalimantan Selatan	69,92	70,44	71,08
23. Kalimantan Timur	75,56	76,22	76,71
24. Sulawesi Utara	76,09	76,54	76,95
25. Sulawesi Tengah	71,14	71,62	72,14
26. Sulawesi Selatan	71,62	72,14	72,7
27. Sulawesi Tenggara	70,00	70,55	71,05
28. Gorontalo	70,28	70,82	71,31
29. Sulawesi Barat	69,64	70,11	70,73
30. Maluku	71,42	71,87	72,42
31. Maluku Utara	69,03	69,47	69,98
32. Papua Barat	69,15	69,65	70,22
33. Papua	64,94	65,36	65,86
<b>Indonesia</b>	<b>72,27</b>	<b>72,77</b>	<b>73,29</b>
<i>Sumber: bps.go.id</i>			

Untuk tingkat Provinsi Jawa Barat, meski pencapaian IPM dalam lima tahun terakhir terus meningkat, pencapaian itu masih jauh dari target yang dicanangkan. Hal ini terlihat misalnya ketika Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2011 di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, dalam laporan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali gagal mencapai target IPM. Gubernur dinilai telah gagal merealisasikan target pemerintahannya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum APBD (KUA perubahan tahun 2011), saat itu

Kuswara, 2014

*Pengembangan Model Pembelajaran Keberaksaraan Berorientasi Budaya Lokal Untuk Menuntaskan Tunaakasa Dewasa Pada Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Cirebon*  
Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

IPM Jawa Barat ditargetkan mencapai 73,24-73,39 poin. Namun, berdasarkan data BPS ternyata IPM Jawa Barat tahun 2011 hanya 72,82 poin. Dalam LKPJ itu juga tertulis bahwa indikator pendidikan mencapai 82,55 poin (target 82,92-83,29) dan indikator kesehatan mencapai 72,34 (target 73,33-73,40).

Walau begitu, secara fakta IPM semua kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat sebenarnya mengalami kenaikan secara bervariasi. Secara umum terjadi kenaikan hampir satu poin setiap tahun di Provinsi Jawa Barat. Kalau tren kenaikan IPM mendekati satu poin per tahun terus berlanjut, target IPM 80 setidaknya akan dicapai pada tahun 2020. Hal ini disebabkan data IPM tahun 2012 saja baru mencapai angka 73,11. Kecuali jika setiap tahun Provinsi Jawa Barat mampu menaikkan dua angka setiap tahun, provinsi ini bisa mencapai target yang ditetapkan sebelum tahun 2018.

Kalau diamati, ternyata sejumlah kabupaten/kota mengalami kenaikan IPM yang begitu menggembirakan, sementara yang lain relatif lambat. Hal ini menunjukkan telah terjadi perbedaan laju kecepatan peningkatan IPM. Beberapa kabupaten yang masih kecil IPM-nya antara lain: Indramayu, Cirebon, Cianjur, Karawang, dan Majalengka. Sementara, beberapa kota penyangga ibukota seperti Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Bogor merupakan daerah yang IPM-nya tinggi. Bagi daerah perkotaan sebenarnya cukup sulit untuk meningkatkan angka IPM, karenanya kita sebut sebagai daerah *hardrock*. Sebaliknya, lebih mudah bagi wilayah kabupaten yang masih memiliki IPM tergolong rendah untuk meningkatkan IPM-nya, karenanya kita sebut sebagai daerah *softrock*. Misalnya, pada tahun 2008 telah diberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu atas komitmen tertinggi terhadap peningkatan IPM. Hal ini karena memang Kabupaten Indramayu masih dalam kategori *softrock*, yaitu masih dapat menggenjot IPM-nya secara relatif lebih cepat. Termasuk kategori kabupaten *softrock* lainnya adalah Kabupaten Cirebon, Kuningan, dan juga Majalengka.

Kuswara, 2014

*Pengembangan Model Pembelajaran Keberaksaraan Berorientasi Budaya Lokal Untuk Menuntaskan Tunaakasa Dewasa Pada Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Cirebon*  
Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang perkembangan IPM Kabupaten Cirebon, maka berikut ini akan dibandingkan IPM Kabupaten Cirebon dengan angka Provinsi Jawa Barat serta beberapa kabupaten/kota di sekitarnya yaitu Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Indramayu. Posisi geografis kabupaten/kota tersebut terletak di kawasan timur Provinsi Jawa Barat, sehingga pada sistem administrasi pemerintahan kabupaten/kota tersebut disatukan dalam satu cakupan Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Cirebon. Secara karakteristik wilayah-wilayah tersebut mempunyai kemiripan dalam hal karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya. Secara umum masyarakat di wilayah tersebut merupakan daerah pertanian padi, palawija maupun hortikultura kecuali Kabupaten/Kota Cirebon dan Indramayu yang berbatasan dengan laut sehingga masyarakatnya juga sebagian ada yang berprofesi sebagai nelayan.

**Tabel 1.3**  
**Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Ciayumajakuning Tahun 2013**

<b>NO</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1	Kota Cirebon	75,83
2	Kab. Kuningan	72,21
3	Kab. Majalengka	72,02
4	Kab Cirebon	71,18
5	Kab. Indramayu	69,96
	Prov. Jawa Barat	73,40

*Sumber: RPJMN Provinsi Jawa Barat Tahun 2014*

Tabel di atas memperlihatkan perbandingan angka IPM kabupaten/kota di wilayah Cirebon. Kabupaten Cirebon dengan IPM 71,18 berada pada posisi ke 4 dari 5 kabupaten/kota tersebut. Posisi tertinggi di adalah Kota Cirebon disusul

Kuswara, 2014

*Pengembangan Model Pembelajaran Keberaksaraan Berorientasi Budaya Lokal Untuk Menuntaskan Tunaakasa Dewasa Pada Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Cirebon*  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Sementara Kabupaten Indramayu berada pada posisi paling bontot.

Membandingkan dengan angka IPM Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon masih berada di bawah rata-rata IPM Jawa Barat dengan selisih 2,22 poin, dengan Kabupaten Kuningan terdapat selisih 1,03 poin, sementara dengan Kota Cirebon selisih 4,65 poin. Posisi Kota Cirebon tersebut sudah cukup jauh berada di atas kabupaten lain, bahkan di atas rata-rata IPM Jawa Barat yang 73,40. Posisi tertinggi Kota Cirebon, didukung oleh ketiga komponennya yaitu Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan Indeks Daya Beli yang jauh meninggalkan kabupaten lain.

Karakteristik wilayah perkotaan Kota Cirebon memungkinkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibanding dengan Kabupaten Cirebon, atau kabupaten lain. Kemampuan ekonomi yang tinggi, berpengaruh terhadap tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat juga relatif semakin tinggi. Kota Cirebon merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Jawa Barat. Hal ini didukung oleh adanya Pelabuhan Cirebon serta tumbuhnya sektor industri, perdagangan, dan jasa. Banyak pusat perbelanjaan, hotel, dan rumah makan dibangun para investor karena melihat posisi Kota Cirebon sebagai daerah yang strategis di daerah Pantura. Di bidang pendidikan sarana-sarana pendidikan di Kota Cirebon dibangun bukan hanya pada tingkat pendidikan dasar, tetapi pendidikan menengah dan tinggi. Tercatat beberapa perguruan tinggi semakin banyak didirikan untuk memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia di Kota Cirebon.

Adanya gambaran IPM Kabupaten Cirebon dibanding kabupaten dan kota lainnya di wilayah Ciayumajakuning di atas maka menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Cirebon untuk dapat meningkatkan IPM secara signifikan sehingga dapat mengikuti langkah Kota Cirebon atau setidaknya dapat melewati angka IPM Provinsi Jawa Barat pada tahun-tahun mendatang.

**Kuswara, 2014**

*Pengembangan Model Pembelajaran Keberaksaraan Berorientasi Budaya Lokal Untuk Menuntaskan Tunaaksara Dewasa Pada Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Cirebon*  
Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

## 2. Tingginya Angka Tunaaksara di Jawa Barat

Program penuntasan tunaaksara merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan target tercapainya peningkatan tingkat keberaksaraan penduduk. Tingkat keberaksaraan tersebut pada gilirannya akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan indeks pendidikan sebagai bagian dari komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini tergambar dari keberhasilan peningkatan IPM Provinsi Jawa Barat tahun 2012 mencapai 73,19 poin atau meningkat dibandingkan IPM tahun 2011 yang hanya 72,82 poin. Pada tahun 2013, IPM Jawa Barat mencapai 73,40 poin, atau meningkat 0,21 poin dibandingkan 2012 sebesar 73,19 poin. Jika dibandingkan pada tahun 2007, IPM Jabar pada 2013 mengalami kenaikan 2,69 poin.

Pencapaian indeks pendidikan pada 2013 sebesar 82,31 poin, menurun 0,44 poin dari 2012 sebesar 82,75 poin. Rata-rata lama sekolah (RLS) pada 2013 sebesar 8,09 tahun, sedangkan angka melek huruf (AMH) penduduk Jawa Barat usia 15 tahun ke atas pada 2013 sebesar 96,49 persen. Nampaklah bahwa penuntasan tunaaksara sebagai salah satu bagian dari komponen indeks pendidikan dapat menjadi jalan cepat bagi peningkatan IPM di Jawa Barat.

Untuk mengukur kinerja pendidikan keberaksaraan digunakan indikator angka tunaaksara penduduk usia 15 tahun ke atas, yaitu rasio jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tunaaksara terhadap jumlah seluruh penduduk pada usia 15 tahun ke atas. Kondisi penduduk di Provinsi Jawa Barat seluruhnya pada tahun 2010 berjumlah 43.110.210 jiwa dan sebanyak 31.736.850 Jiwa (73,62%) berusia 15 tahun ke atas. Sementara berdasarkan data yang tersedia masih terdapat penyandang tunaaksara usia 15 tahun ke atas sebanyak 1.031.841 jiwa atau 3,25%, yang telah ditangani pada tahun 2011 sebanyak 18.000 jiwa, dan akan ditangani pada tahun 2012 sebanyak 153.506 jiwa untuk mencapai AMH 97,42% sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kuswara, 2014

*Pengembangan Model Pembelajaran Keberaksaraan Berorientasi Budaya Lokal Untuk Menuntaskan Tunaaksara Dewasa Pada Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Cirebon*  
Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

Provinsi Jawa Barat yang didanai dari dana APBN dekonsentrasi sebanyak 18.000 jiwa serta dari APBD 90.000 dan sebanyak 45.506 jiwa didanai dari APBD kabupaten/kota dan dana lain, sehingga sisa yang akan dituntaskan sampai dengan tahun 2013 yaitu 836.158 jiwa.

Akhirnya dapat digarisbawahi bahwa penuntasan tunaakhsara terhadap penduduk dewasa menjadi prioritas dalam pembangunan pendidikan karena didasari oleh pertimbangan:

1. satu-satunya cara meningkatkan IPM yang paling murah dan cepat adalah dengan cara menurunkan jumlah tunaakhsara secara signifikan;
2. tingkat keberaksaraan penduduk suatu negara sangat memengaruhi tingkat kesehatan, gizi, kematian ibu dan anak, kesejahteraan, dan angka harapan hidup (UNESCO, 2003 dan Bank Dunia, 2004);
3. pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara. Oleh sebab itu, penduduk yang masih tunaakhsara wajib dan diprioritaskan memperoleh layanan pendidikan keberaksaraan;
4. tunaakhsara terkait erat dengan kebodohan, keterbelakangan, pengangguran, dan ketidakberdayaan, yang bermuara pada kondisi ekonomi penduduk penyandangnyanya menjadi kurang beruntung/miskin yang bermuara pada rendahnya produktivitas penduduk. Artinya, tunaakhsara dan kemiskinan merupakan dua dimensi yang tidak terpisahkan, sehingga sangatlah perlu dilakukan program penuntasan tunaakhsara secara terintegrasi dengan berbagai program lainnya, seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, gizi, dan keluarga berencana;

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah merupakan upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan pencapaian angka melek huruf (AMH) secara signifikan. Oleh karena itu, peta permasalahan penuntasan masalah pendidikan di Jawa Barat sebenarnya sudah dipahami dan

**Kuswara, 2014**

*Pengembangan Model Pembelajaran Keberaksaraan Berorientasi Budaya Lokal Untuk Menuntaskan Tunaakhsara Dewasa Pada Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Cirebon*  
Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

ditemukan penyebabnya. Namun, untuk sampai menuntaskan masalah masih dihadap oleh banyak faktor, baik secara internal, eksternal, mikro, makro maupun oleh hal-hal nonteknis dan politis. Oleh karena itu, penuntasan terhadap masalah pendidikan Jawa Barat memerlukan gerakan masyarakat yang melibatkan semua komponen masyarakat, termasuk perguruan tinggi.

Saat ini terdapat 10 kabupaten yang AMH-nya masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat seperti terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.4**  
**Kabupaten dengan AMH di Bawah Rata-Rata Provinsi**  
**Tahun 2013**

NO	KABUPATEN	AMH
1	Kab. Indramayu	88,10
2	Kab. Subang	92,40
3	Kab. Bogor	94,90
4	Kab. Cirebon	95,40
5	Kab. Kuningan	95,00
6	Kab. Bekasi	95,10
7	Kab. Majalengka	95,20
8	Kab. Ciamis	97,30
9	Kab. Purwakarta	97,60
10	Kab. Sumedang	97,80
	AMH Provinsi = 97,89	

*Sumber: RPJMN Provinsi Jawa Barat, Tahun 2014*

Data tahun 2013 di atas dapat dibandingkan dengan data tahun 2011 di mana di Jawa Barat masih terdapat 3,11% penduduk usia 15 tahun ke atas yang tunaaksara. Jumlah tersebut secara absolut adalah sebesar 1.007.664 jiwa sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 1.5**  
**Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Tunaaksara di Jawa Barat pada**  
**Tahun 2011 per Kabupaten/Kota**

Kuswara, 2014

*Pengembangan Model Pembelajaran Keberaksaraan Berorientasi Budaya Lokal Untuk Menuntaskan Tunaaksara Dewasa Pada Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Cirebon*  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN / KOTA</b>	<b>JUMLAH TUNAAKSARA TAHUN 2011</b>
1	Kab. Indramayu	147.530
2	Kab. Bogor	88.317
3	Kab. Karawang	75.030
4	Kab. Cirebon	88.550
5	Kab. Bekasi	65.329
6	Kab. Subang	76.367
7	Kab. Kuningan	65.377
8	Kab. Majalengka	50.725
9	Kab. Sukabumi	36.411
10	Kab. Bandung	33.835
11	Kab. Ciamis	31.893
12	Kab. Cianjur	27.771
13	Kab. Garut	17.311
14	Kab. Tasikmalaya	17.618
15	Kota Bekasi	16.170
16	Kota Depok	11.352
17	Kab. Sumedang	26.559
18	Kab. Purwakarta	46.326
19	Kota Bogor	13.497
20	Kota Cirebon	31.726
21	Kota Bandung	3.177
22	Kota Tasikmalaya	5.670
23	Kota Banjar	3.258
24	Kota Sukabumi	3.640
25	Kota Cimahi	3.635
26	Kab. Bandung Barat	20.590
<b>Jumlah</b>		<b>1.007.664</b>

Sumber: *Rencana Aksi Daerah Penuntasan Tunaaksara Provinsi Jawa Barat Tahun 2011*

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka tunaaksara di daerah kabupaten masih jauh lebih besar dibandingkan angka di kota. Pada tahun 2011 persentase penduduk tunaaksara di kota hanya sekitar 9,14 % jauh di bawah angka

Kuswara, 2014

*Pengembangan Model Pembelajaran Keberaksaraan Berorientasi Budaya Lokal Untuk Menuntaskan Tunaaksara Dewasa Pada Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Cirebon*  
 Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

tunaaksara di kabupaten yang mencapai 90.86 % dari total jumlah penduduk tunaaksara pada tahun 2011 sebesar 1.007.664 jiwa.

Hasil studi eksplorasi menunjukkan masih terdapatnya beberapa permasalahan terkait penuntasan tunaaksara di Jawa Barat. Permasalahan tersebut di antaranya:

***Pertama, budaya masyarakat***

Budaya masyarakat yang memengaruhi keberadaan tunaaksara di antaranya sebagai berikut.

- Nilai-Nilai Sosial

Sikap masyarakat yang tidak mau dan malu menginformasikan bahwa dirinya atau ada di antara masyarakat lingkungannya yang tunaaksara merupakan hambatan sosial yang ditemukan saat ini. Adapula masyarakat yang beranggapan bahwa program-program penuntasan tunaaksara yang dilakukan selama ini kurang bermanfaat bagi perbaikan kehidupannya. Artinya, meskipun mereka nantinya melek aksara belum tentu langsung mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat tidak terdorong--apalagi antusias--untuk mengikuti program-program penuntasan tunaaksara.

- Mata Pencaharian

Mata pencaharian musiman yang ada pada masyarakat sering memengaruhi keikutsertaan dalam program-program penuntasan tunaaksara. Pada saat musim panen tiba, masyarakat cenderung lebih memilih mencari nafkah daripada mengikuti pembelajaran. Bagi keluarga nelayan di pesisir, saat musim tangkapan sedang melimpah, semua anggota keluarga dikerahkan untuk menangkap atau mengolah ikan, bahkan pekerjaan lain biasanya dihentikan terlebih dahulu. Tak ada waktu lagi untuk mengikuti program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah atau LSM.

- Domisili Penduduk

Kuswara, 2014

*Pengembangan Model Pembelajaran Keberaksaraan Berorientasi Budaya Lokal Untuk Menuntaskan Tunaaksara Dewasa Pada Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Cirebon*  
Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

Ada penduduk yang sejak awal memang tidak pernah sekolah karena berbagai alasan misalnya kondisi ekonomi keluarga, kondisi geografis, atau larangan adat. Domisili penduduk berpencar dan jauh dari tempat diselenggarakannya program selalu menjadi alasan untuk tidak mengikuti program penuntasan tunaakhsara. Kelompok masyarakat yang berada di lingkungan adat tertentu yang melarang warganya mendapat pendidikan, menjadikan program-program penuntasan tunaakhsara sulit dilakukan.

### ***Kedua, motivasi penduduk***

Permasalahan utama yang dihadapi dalam usaha penuntasan tunaakhsara ialah: Pertama, tiap tahun terus terjadi siswa putus sekolah dasar kelas I, II dan III yang diperkirakan menjadi tunaakhsara kembali. Kedua, adanya penduduk yang sejak awal memang tidak sekolah. Ketiga, warga belajar yang mengikuti program penuntasan tunaakhsara menjadi tunaakhsara kembali karena kurang intensifnya pemeliharaan keberaksaraan mereka. Ketiga hal tersebut menunjukkan rendahnya motivasi belajar warga belajar dan masyarakat sekitarnya.

### ***Ketiga, sarana dan ketenagaan***

Sarana dan ketenagaan yang kurang memadai dan kurang berkualitas berpengaruh pula terhadap keberadaan penduduk tunaakhsara. Sarana dan ketenagaan yang masih kurang memadai ini berkaitan dengan:

- masih rendahnya kapasitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan layanan pendidikan keberaksaraan. Tutor sebagai pendidik program-program keberaksaraan belum memiliki standar kompetensi yang seragam. Tutor umumnya adalah relawan dari berbagai kalangan dengan latar belakang kompetensi yang beragam, sehingga perlu penanganan secara khusus;

Kuswara, 2014

*Pengembangan Model Pembelajaran Keberaksaraan Berorientasi Budaya Lokal Untuk Menuntaskan Tunaakhsara Dewasa Pada Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Cirebon*  
Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

- keterbatasan bahan belajar, seperti modul dan fasilitas belajar lainnya. Sistem pendukung pembelajaran program penuntasan tunaakhsara masih sangat terbatas. Kebijakan pendidikan nasional dan daerah masih bertumpu pada pendidikan formal, dan kurang memfasilitasi pendidikan nonformal, termasuk program-program yang berorientasi penuntasan tunaakhsara.

#### **Keempat, peran dan partisipasi masyarakat**

Peran dan partisipasi masyarakat masih rendah, hal itu tercermin dari:

- rendahnya kepedulian masyarakat, baik untuk mengikuti program penuntasan tunaakhsara maupun sebagai penyelenggara program penuntasan tunaakhsara. Selama ini, penyelenggara program penuntasan tunaakhsara umumnya disokong oleh pemerintah, baik dari segi pendanaan maupun bentuk-bentuk programnya, selain lembaga pemerintah terdapat lembaga-lembaga donor internasional dan perusahaan-perusahaan melalui kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) memberikan sokongan bagi program-program penuntasan tunaakhsara;
- ketergantungan masyarakat, dalam hal ini masyarakat lebih mengandalkan pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah sehingga tidak punya inisiatif untuk mengatasi persoalan tunaakhsara di daerahnya secara mandiri. Masih jarang program penuntasan tunaakhsara dilakukan atas inisiatif masyarakat secara sukarela. Keberadaan tunaakhsara dalam sebuah komunitas belum dipandang sebagai masalah prioritas yang perlu dituntaskan. Kesadaran akan nusantara yang literat belum menjadi bagian dari agenda kesadaran bersama masyarakat.

### **3. Lemahnya Intervensi Penuntasan Tunaakhsara Melalui Budaya Lokal**

Dalam Deklarasi Dakkar (*Dakkar Frame Work of Action*, 2000), terdapat enam kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota

Kuswara, 2014

*Pengembangan Model Pembelajaran Keberaksaraan Berorientasi Budaya Lokal Untuk Menuntaskan Tunaakhsara Dewasa Pada Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Cirebon*  
Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)



UNESCO. Tiga hal yang berkaitan erat dengan permasalahan yang telah diuraikan adalah:

- a. mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa;
- b. menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2005 dan mencapai persamaan gender dalam pendidikan menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan sama pada prestasi dalam pendidikan dasar dengan kualitas yang baik;
- c. memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya sehingga hasil-hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh semua, terutama dalam keberaksaraan, angka dan kecakapan hidup yang penting.

Data jumlah tunaaksara di Jawa Barat tahun 2012 untuk usia 15 tahun ke atas mencapai 1.072.160 orang atau 3,52% dari jumlah penduduk Jawa Barat usia tersebut sebanyak 30.459.084 jiwa. Dengan demikian, angka melek huruf (AMH) di Jawa Barat hingga pertengahan 2012 baru mencapai 96,48%. Angka melek huruf di Jawa Barat ini sudah di atas rata-rata nasional, yakni 95 persen. Tetapi, jika diakumulasikan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan yang mencapai 43.053.732 jiwa, jumlah tunaaksara ini masih tinggi.

Penuntasan tunaaksara sebenarnya tidak hanya dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi juga pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah pusat pun terjun langsung ke kabupaten/kota untuk menuntaskan keberadaan tunaaksara dengan menggunakan dana di luar dana dekonsentrasi. Walaupun program penuntasan tunaaksara telah dilakukan secara masif, masih adanya sisa tunaaksara yang belum tertuntaskan menunjukkan masih adanya permasalahan serius dan kompleks dalam usaha-usaha penuntasan tunaaksara.

**Kuswara, 2014**

*Pengembangan Model Pembelajaran Keberaksaraan Berorientasi Budaya Lokal Untuk Menuntaskan Tunaaksara Dewasa Pada Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Cirebon*  
Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

Di sisi lain, program penuntasan tunaakhsara melalui budaya lokal masih belum banyak dilakukan. Padahal, Szwed (1982) menunjukkan bahwa satu standar keberaksaraan tidak dapat diaplikasikan untuk semua orang: “ada ‘pluralitas keberaksaraan’, berdasarkan konteks sosial tertentu dan kebutuhan individu, tujuan dan motivasi untuk membaca dan menulis di dalam konteks tersebut” (Szwed, 1982: 12). Pluralitas keberaksaraan sangat diperlukan untuk menjamin metodologi pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran keberaksaraan sesuai dengan konteks lokal.

Beberapa persoalan lain yang menghambat penuntasan tunaakhsara dipandang dari aspek budaya masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberadaan tunaakhsara, di antaranya: 1) sikap masyarakat yang tidak mau dan malu jika disebut tunaakhsara, 2) mata pencaharian musiman sering memengaruhi masyarakat untuk mengikuti program pendidikan, 3) adanya penduduk yang sejak awal memang tidak mau sekolah karena berbagai alasan misalnya kondisi ekonomi keluarga, atau kondisi geografis.

Persoalan-persoalan di atas merupakan persoalan sosial dan budaya, dan bukan semata-mata masalah pendidikan, yang dalam hal ini persoalan tidak bisa baca, tulis, dan hitung. Belum lagi beranekaragamnya kondisi sosial dan budaya di masing-masing daerah. Misalnya, budaya masyarakat pedalaman dan pesisiran sangat berbeda, dan di sinilah pentingnya memahami pluralitas keberaksaraan dalam konteks penuntasan tunaakhsara. Selanjutnya, adanya perbedaan-perbedaan kondisi sosial dan budaya tersebut pada akhirnya membutuhkan model-model penuntasan tunaakhsara yang berbeda-beda pula, yaitu model-model yang sesuai dengan konteks dan budaya lokal masing-masing daerah.

## **B. Identifikasi Masalah Penelitian**

Dari uraian di atas, terungkap beberapa persoalan umum dan akhirnya terfokus pada persoalan program keberaksaraan. Permasalahan tersebut antara

Kuswara, 2014

*Pengembangan Model Pembelajaran Keberaksaraan Berorientasi Budaya Lokal Untuk Menuntaskan Tunaakhsara Dewasa Pada Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Cirebon*  
Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

lain: (1) rendahnya indeks pembangunan manusia salah satunya bersumber dari masih tingginya jumlah penduduk tunaaksara dewasa, (2) keberadaan tunaaksara dewasa menyebar pada komunitas budaya yang beragam dan dengan berbagai kondisi alamnya menyebabkan program penuntasan tunaaksara belum secara cepat terselesaikan, (3) aspek budaya belum secara maksimal dimanfaatkan sebagai pilihan pendekatan pembelajaran dalam program penuntasan tunaaksara, (4) belum beragamnya model pembelajaran keberaksaraan yang bernuansa ‘pluralitas keberaksaraan’ yang dapat digunakan untuk menjangkau beragam karakter kelompok sasaran tunaaksara, (5) kurang optimalnya muatan ideologi dalam pembelajaran keberaksaraan, dan (6) besarnya tantangan untuk pencapaian kesepakatan atau *The Dakar Frame Work of Action 2000*, khususnya; (a) mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa, (b) menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2005 dan mencapai persamaan gender dalam pendidikan menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan sama pada prestasi dalam pendidikan dasar dengan kualitas yang baik, (c) memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya, sehingga hasil-hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh semua terutama dalam keberaksaraan, angka, dan kecakapan hidup.

Dari beberapa permasalahan yang telah dikemukakan, seperti belum dimaksimalkannya pendekatan budaya, belum beragamnya model pembelajaran keberaksaraan, rendahnya muatan ideologi, dan tantangan pencapaian target kesepakatan Dakar, maka fokus penelitian dan pengembangan model ini diarahkan pada “Apakah kemampuan keberaksaraan pada tunaaksara dewasa dapat dikembangkan melalui pembelajaran yang disajikan dengan menggunakan model pembelajaran keberaksaraan berorientasi budaya lokal?”

**Kuswara, 2014**

*Pengembangan Model Pembelajaran Keberaksaraan Berorientasi Budaya Lokal Untuk Menuntaskan Tunaaksara Dewasa Pada Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Cirebon*  
Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Rumusan masalah dalam penelitian dan pengembangan ini dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian berikut, yaitu:

- (1) Bagaimanakah kondisi sosial budaya pada masyarakat pesisir di Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon?
- (2) Bagaimanakah profil keberaksaraan pada masyarakat pesisir di Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon?
- (3) Bagaimanakah rancangan model pembelajaran keberaksaraan berorientasi budaya lokal masyarakat pesisir?
- (4) Bagaimanakah efektivitas model pembelajaran keberaksaraan berorientasi budaya lokal dalam menuntaskan tunaakhsara dewasa pada masyarakat pesisir di Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah sebagai berikut:

1. mengidentifikasi kondisi sosial budaya pada masyarakat pesisir di Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon;
2. mendeskripsikan situasi keberaksaraan pada masyarakat pesisir di Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon;
3. merancang model pembelajaran keberaksaraan berorientasi budaya lokal masyarakat pesisir; dan
4. menguji efektivitas model pembelajaran keberaksaraan berorientasi budaya lokal dalam menuntaskan tunaakhsara dewasa pada masyarakat pesisir di Desa Gebang Mekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

Kuswara, 2014

*Pengembangan Model Pembelajaran Keberaksaraan Berorientasi Budaya Lokal Untuk Menuntaskan Tunaakhsara Dewasa Pada Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Cirebon*  
Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian dan pengembangan ini memiliki kegunaan atau manfaat di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Pemanfaatan pendekatan budaya lokal mengurangi hambatan budaya dan bahkan kekagetan budaya dalam proses pembelajaran, warga belajar cenderung merasa nyaman, aman, dan bahkan bangga ketika budaya di lingkungannya dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran.
  - b. Kejelasan dan kesesuaian model pembelajaran keberaksaraan dengan kebutuhan nyata dan kebutuhan teras warga belajar yang didukung oleh instrumen pembelajaran yang berorientasi budaya lokal memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pembelajaran keberaksaraan.
2. Manfaat Pengembangan Kebijakan
  - a. Pemangku kebijakan perlu mengembangkan program penuntasan tunaakhsara yang memiliki semangat ‘pluralitas keberaksaraan’ dengan menyediakan aneka model pembelajaran yang sesuai dengan karakter sosial dan budaya setempat.
  - b. Pemangku kebijakan perlu mengembangkan panduan, bahan-bahan, dan materi pembelajaran generik yang memanfaatkan pendekatan budaya lokal sebagai bagian dari kebijakan program penuntasan tunaakhsara.
3. Manfaat Praktis
  - a. Pendidik dan tenaga kependidikan program penuntasan tunaakhsara harus memahami dengan benar struktur pengajaran sehingga bisa mencapai hasil pembelajaran yang optimal.
  - b. Penyelenggara program pada komunitas khusus dianjurkan memahami dengan benar kondisi sosial-budaya dan keunikan komunitas tersebut agar mencapai hasil pembelajaran yang maksimal.
4. Manfaat Sosial

**Kuswara, 2014**

*Pengembangan Model Pembelajaran Keberaksaraan Berorientasi Budaya Lokal Untuk Menuntaskan Tunaakhsara Dewasa Pada Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Cirebon*  
Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

- a. Memberikan sumbangsih penuntasan tunaakarsa di wilayah pesisir Kabupaten Cirebon sebanyak 21 orang warga belajar.
- b. Memberikan sumbangsih pengembangan pemberdayaan diri dan kecakapan vokasional tertentu bagi 21 orang warga belajar.

## **F. Struktur Organisasi Disertasi**

Laporan penelitian dan pengembangan ini dibagi dalam sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Membahas latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penelitian.
- Bab II : Membahas landasan teoretis, penelitian sebelumnya, dan kerangka pikir penelitian.
- Bab III : Membahas metodologi penelitian, yang terdiri atas: lokasi dan subjek penelitian, desain penelitian, prosedur penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen, dan teknik pengumpulan data.
- Bab IV : Membahas hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri atas pengolahan data dan analisis temuan.
- Bab V : Membahas simpulan dan saran, yang terdiri atas simpulan dan saran-saran.
- Daftar Pustaka : Terdiri atas daftar referensi yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan penelitian ini.